

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis data yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan menjadi tiga aspek *Countenance Stake*, yaitu aspek kesiapan penerima KJP (*antecedents*), Pelaksanaan KJP (*Transaction*), dan pemanfaatan KJP (*outcomes*)

1. Evaluasi Pemanfaatan Program Kartu Jakarta Pintar di SMK PSKD I Jakarta pada aspek kesiapan penerima Program Kartu Jakarta Pintar secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik dengan persentase 78,75%. Aspek kesiapan penerima KJP terdiri dari 3 dimensi yaitu:

- a) Risiko administrasi sekolah sesuai dengan petunjuk teknis KJP dengan mendata awal siswa dari keluarga tidak mampu di awal siswa masuk untuk pemenuhan persyaratan pengajuan KJP,
- b) Risiko kesiapan penerima Program Kartu Jakarta Pintar pada siswa sebesar 78,75% sedangkan kesiapan penerima KJP pada Orang tua belum memahami tentang KJP,
- c) Risiko Kesiapan staff sekolah secara keseluruhan sudah memahami tentang Program Kartu Jakarta Pintar dalam proses pengajuan, pelaksanaan dan pemanfaatan KJP.

2. Evaluasi Pemanfaatan Program Kartu Jakarta Pintar di SMK PSKD I Jakarta pada aspek pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik dengan persentase 74,61% dan sesuai dengan petunjuk teknis KJP. Aspek pelaksanaan KJP terdiri dari 6 indikator.

- a) Indikator sosialisasi KJP pada siswa sebesar 72,78% sedangkan pada orang tua sosialisasi KJP hanya disisipkan rapat dan terima rapor oleh sekolah.
- b) Indikator Prosedur pelaksanaan sesuai dengan petunjuk teknis KJP yaitu guru melakukan pendataan kepemilikan KPS pada siswa dan serta siswa dari keluarga tidak mampu.
- c) Indikator tahap pengajuan KJP sebesar 72,5%. Sekolah mengajukan seluruh siswa yang berhak memperoleh KJP dengan data saat awal masuk sekolah bagi siswa yang memiliki KPS (Kartu Perlindungan Sosial) dan tidak mampu.
- d) Indikator Penetapan Penerima KJP sebesar 70%. Sekolah menginformasikan Surat Keputusan Penerima KJP langsung kepada siswa.
- e) Indikator tahap pencairan sebesar 72,78%. Waktu pencairan dana KJP dianggap kurang tepat karena baru cair di akhir tahun sehingga dari sisi pemanfaatan menjadi tidak maksimal untuk pendidikan.
- f) Indikator Monitoring dan evaluasi sebesar 85%. Sekolah melakukan kebijakan mengelola dana KJP dari siswa dengan tujuan memonitoring penggunaan dana untuk pendidikan siswa berdasarkan hasil evaluasi pada

tahun sebelumnya sedangkan monitoring dari dinas tidak ada kepada sekolah terkait pelaksanaan KJP.

3. Evaluasi Pemanfaatan Program Kartu Jakarta Pintar di SMK PSKD I Jakarta pada aspek pemanfaatan Program Kartu Jakarta Pintar secara keseluruhan termasuk dalam kategori sangat baik dengan persentase 86,51%. Aspek pemanfaatan KJP terdiri dari 5 indikator,
 - a. Indikator Alokasi penggunaan dana sebesar 78,81%. Sekolah pada tahun ini membuat kebijakan alokasi penggunaan dana KJP dilakukan oleh sekolah dengan tujuan untuk pemenuhan biaya pendidikan siswa.
 - b. Indikator peningkatan akademik sebesar 90,56%, pada motivasi belajar siswa, KJP membuat hasil belajar rapor siswa menunjukkan peningkatan nilai.
 - c. Indikator keaktifan siswa sebesar 89,17% dengan menurunnya angka ketidakhadiran siswa dalam KBM.
 - d. Indikator Laporan pelaksanaan KJP hanya didapat laporan *online* terkait penyerapan dana penerima KJP.
 - e. Indikator Perubahan Penerima KJP dari sisi tujuan sebesar 87,5%, terjadi perubahan kepada siswa yang memperoleh Program Kartu Jakarta Pintar.
4. Faktor Pendukung pemanfaatan Program Kartu Jakarta Pintar antara lain:
 - a) Adanya pendataan awal siswa dari keluarga miskin di awal peserta didik besekolah.
 - b) Tim pelaksana KJP yang tidak mengalami pergantian dalam setiap tahunnya.

- c) Kebijakan sekolah untuk mengelola dana KJP agar dapat maksimal dalam pemanfaatannya.
5. Faktor Penghambat pemanfaatan Program Kartu Jakarta Pintar antara lain:
- a) Kurangnya sosialisasi dari sekolah dan dinas terkait tentang KJP.
 - b) pemberitahuan informasi yang selalu mundur dari dinas terkait.
 - c) Waktu pencairan yang tidak sesuai dengan eaktu kebutuhan siswa.
 - d) Tidak adanya monitoring dalam pelaksanaan KJP.

5.2 Menejemen Risiko KJP

Berdasarkan hasil penelitian, maka yang menjadi menejemen risiko agar dana yang sudah di terima oleh siswa sesuai dengan tujuannya, maka pihak Pemerintah DKI Jakarta melalui sekolah SMK PSKD I Jakarta Pusat membuat aturan sebagai berikut:

1. Hasil dokumentasi pelaksanaan KJP untuk untuk indikator penetapan penerima KJP pada tanggal 23 Maret 2017 dengan jumlah siswa penerima.
2. Percairan dana KJP sesuai edaran Kemendikbud nomor 2929/D5.5/KU/2015 pada tanggal 29 Juni 2017.
3. Pencairan dana KJP di SMK PSKD I Jakarta Pusat melalui bank DKI.
4. Dalam rangka melayani pengguna KJP sesuai kebijakan Gubernur DKI dengan ketentuan maksimal nominal penerima dana KJP untuk SMA sederajat sebesar Rp200.000/ bulan dengan jumlah maksimal yang dapat ditarik adalah sebesar Rp50.000 dengan ketentuan 2 minggu sekali.

5. Pemegang KJP diperkenankan untuk mengambil lebih dari nominal yang ditentukan apabila memiliki saldo tabungan dari dana KJP tahun lalu.
6. Pemerintah tetap menyarankan pemegang kartu Jakarta Pintar untuk melakukan penarikan via ATM Bank DKI.
7. Pengguna KJP diminta menginput nomor PIN pada saat melakukan transaksi melalui EDC Bank DKI dan Debit Prima.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mulai dari perencanaan hingga penyusunan laporan penelitian. Namun demikian, penelitian ini juga tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan, antara lain:

1. Waktu penelitian yang kurang tepat, sehingga menyulitkan peneliti dalam mengumpulkan data yang berakibat pada lamanya waktu penelitian.
2. Responden dari penelitian yang beraktifitas mencari nafkah sehingga tidak sesuai harapan peneliti dalam menjaring data dari pihak responden yaitu orangtua siswa yang mengurus pendidikan anaknya.
3. Responden dari angket penelitian yang terbatas, hal ini dapat berakibat pada kurang representatifnya data. Namun, hal tersebut telah diperkuat dengan melakukan pengambilan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara dengan pihak terkait.
4. Terbatasnya dokumen Program Kartu Jakarta Pintar di sekolah sehingga menyulitkan peneliti untuk melakukan studi dokumen. Hal ini hendaknya dijadikan evaluasi bagi sekolah untuk dapat memanajemen dokumen atau arsip sekolah dengan baik.

5. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna. Karena keterbatasan metodologi dan hal ini sudah diusahakan peneliti untuk dapat diatasi dan diminimalisir.
6. Pada akhirnya, peneliti hanya bisa berharap semoga penelitian yang sederhana ini dapat memberikan masukan yang cukup berarti bagi pihak terkait terutama bagi penyelenggara Program Kartu Jakarta Pintar sehingga pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya menjadi semakin baik.

5.4 Saran

Secara umum pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar di PSKD I Jakarta sudah sesuai dengan petunjuk teknis KJP dari direktorat. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan KJP dapat diajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
 - a. Diharapkan pemerintah memperbaiki pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar dengan membuat petunjuk teknis yang lebih detail terkait pelaksanaan KJP
 - b. Lebih mensosialisasikan lagi kepada masyarakat terkait tujuan dan pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar.
 - c. Batasan waktu pelaksanaan pada setiap tahap pelaksanaan KJP lebih diperjelas lagi sehingga penyelenggara di sekolah tidak menunggu tanpa batas waktu.

- d. Merevisi/memperbaiki sistem pengajuan Program Kartu Jakarta Pintar sehingga tidak terlalu banyak SK Penetapan Penerima KJP di Sekolah.
- e. Pencairan dana KJP sebaiknya di awal tahun pembelajaran sehingga sesuai dengan kebutuhan siswa untuk pendidikan.
- f. Lebih mensosialisasikan lagi kepada siswa dan wali murid terkait tujuan dan pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar.
- g. Meningkatkan pemahaman siswa dan orang tua terkait pelaksanaan KJP di Sekolah.
- h. Penerima KJP seharusnya lebih aktif dalam mencari informasi dan memahami dari tujuan Program Kartu Jakarta Pintar.
- i. Lebih sering berkomunikasi dengan penyelenggara di sekolah pemanfaatan KJP.
- j. Informasi yang di dapat dari sekolah segera disampaikan kepada orang tua sehingga maksimal dapam pelaksanaan KJP
- k. Menjalankan kewajiban sebagai penerima KJP sesuai dengan petunjuk teknis.